

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Peran Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dalam kampanye #JagaRuangSiber dapat dilihat melalui pemberian sosialisasi langsung maupun *online*, penyediaan video edukatif, penyusunan *booklet* panduan, penguatan dan pembentukan CSIRT, serta kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan. BSSN telah berupaya meningkatkan *awareness* kepada masyarakat yang dapat dilihat dari adanya peningkatan pemahaman dan kesiapan keamanan informasi yang tercermin dalam penilaian Indeks KAMI.

Dalam kerangka CMM, langkah-langkah tersebut merefleksikan dimensi *Cybersecurity Culture and Society* serta *Building Cybersecurity Knowledge and Capabilities*, yang menekankan pentingnya *awareness* dan peningkatan literasi digital secara berkelanjutan. Kemudian kampanye ini juga merupakan bentuk penerapan terhadap ASEAN *Cybersecurity Cooperation Strategy* (ACCS) 2021–2025 di tingkat nasional. Implementasi kampanye ini selaras dengan fokus ACCS pada *capacity building*, *trust in cyberspace*, serta penguatan ekosistem keamanan siber berbasis kolaborasi. Artinya, kampanye #JagaRuangSiber tidak hanya bersifat informatif, tetapi merupakan bagian dari strategi jangka panjang dalam membangun ketahanan siber nasional berbasis masyarakat.

Peran BSSN dalam kampanye ini juga merupakan respons dari maraknya kasus kebocoran data di Indonesia yang dipahami sebagai persoalan yang menyentuh aspek *human security*, khususnya *personal security*. Kebocoran data berdampak langsung pada rasa aman individu, integritas informasi pribadi, serta

potensi kerugian ekonomi dan psikologis masyarakat. Oleh karena itu, peran BSSN dalam kampanye #JagaRuangSiber merupakan respons terhadap ancaman non-tradisional yang menempatkan individu sebagai subjek utama keamanan. Di tengah dari keterlambatan regulasi dan belum optimalnya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi serta adanya pemotongan anggaran, BSSN tetap berupaya dan telah menjalankan fungsinya secara proaktif, dan telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam memperkuat perlindungan keamanan siber pada masyarakat

4.2 Saran

Berdasarkan temuan dan analisis yang telah dipaparkan dalam penelitian ini, terdapat beberapa saran yang dapat diajukan baik dalam ranah kebijakan, masyarakat, maupun penelitian selanjutnya, guna mendukung keberjalanan kampanye #JagaRuangSiber yang berkelanjutan dalam meningkatkan keamanan siber di Indonesia.

Pertama penguatan regulasi dan penegakan UU PDP, diperlukan agar memiliki daya paksa yang lebih nyata dalam menciptakan kepatuhan keamanan siber kepada masyarakat. Penguatan ini dapat dilakukan dengan penyusunan regulasi turunan berupa pedoman teknis, SOP perlindungan data, serta mekanisme audit dan evaluasi tahunan terhadap penyelenggara sistem elektronik pemerintah. Selain itu, perlu dibentuk satuan pengawas yang bertugas memastikan implementasi UU PDP berjalan konsisten, termasuk memberi sanksi yang tegas terhadap pelanggaran. Tanpa penegakan hukum yang kuat, literasi keamanan digital hanya akan berfungsi sebagai imbauan moral dan tidak mampu membentuk perilaku siber yang patuh secara menyeluruh.

Kedua, peningkatan dan pemerataan anggaran keamanan siber nasional. Kampanye #JagaRuangSiber membutuhkan dukungan pendanaan yang stabil, berjangka panjang, dan terdistribusi secara merata ke instansi pusat maupun daerah. Anggaran yang memadai sangat penting untuk memastikan keberlanjutan program edukasi, peningkatan kapasitas pelatih, pengembangan modul literasi yang adaptif terhadap dinamika ancaman siber, serta peningkatan infrastruktur keamanan yang menyeluruh agar kemampuan keamanan digital masyarakat tidak hanya meningkat di kota besar atau instansi dengan sumber daya tinggi. Dengan anggaran yang optimal, kualitas dan jangkauan program literasi dapat meningkat secara signifikan.

Ketiga, penguatan *political will* pemerintah dalam keamanan siber. Komitmen politik pemerintah sangat dibutuhkan untuk menjadikan keamanan siber sebagai agenda strategis nasional. Tanpa dukungan kuat dari Presiden dan kementerian terkait, kebijakan literasi keamanan digital akan sulit dilembagakan dan berpotensi berjalan secara insidental. Pemerintah perlu menegaskan keamanan digital sebagai bagian dari agenda ketahanan nasional, tidak hanya isu teknis. *Political will* yang kuat akan mempercepat pelebagaan program literasi sehingga dampaknya dapat dirasakan pada seluruh instansi dan sektor yang memerlukan.